



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Maret 2017

Halaman: 17

► PENGAWASAN

Dalami Temuan BPK, Dewan Bentuk Pansus

UMBULHARJO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Jogja 2016 yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Target kami di Pansus ingin melihat sejauh mana Pemerintah Kota Jogja melaksanakan rekomendasi BPK," kata Ketua Pansus Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK, Nasrul Khairi, di DPRD Kota Jogja, Rabu (8/3).

Beberapa pokok hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Jogja dan DPRD Kota Jogja pada akhir Januari lalu di antaranya adalah pengelolaan pajak hotel, restoran, dan

hiburan tidak sesuai ketentuan. Kemudian pendapatan dari penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dan habis masa izinnnya sebesar Rp953 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan.

BPK juga menyoroit soal pengendalian dan pengelolaan parkir yang lemah, karena dari 71 wajib pajak belum melaporkan pajak terutang. Selain itu retibusi pelayanan sampah juga dinilai tidak tertib karena tidak ada rincian wajib pajak retibusi sampah sehingga terdapat kekurangan pembayaran retibusi sebesar Rp363 juta.

Nasrul Khairi menilai persoalan yang menjadi temuan BPK tersebut hampir selalu terulang setiap tahun dan berpotensi terulang di tahun berikutnya. Karena itu sebelum Pemerintah Kota menyusun rencana

kerja (Renja) 2018 pada April mendatang, Pansus akan mengeluarkan rekomendasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun renja.

Ia menargetkan Pansus Pembahasan Hasil Temuan BPK selesai dalam waktu 1,5 bulan ini. "Kami berharap temuan ini hanya faktor administrasi saja dan tidak kembali terulang di tahun berikutnya," ujar Nasrul.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini khawatir jika temuan BPK berpotensi terulang di tahun ini akan mengganggu pembiayaan. Sebab, kata dia, tahun ini, dana transfer dari pusat banyak yang dipangkas sehingga Pemerintah Kota Jogja mengandalkan sumber dan dari pendapatan daerah.

Nasrul menambahkan untuk menekan kebocoran pihaknya juga mendorong penerapan pembayaran semua jenis pajak melalui *online* atau *e-tax*. Kemudian retibusi parkir dan persampahan juga diupayakan bisa terintegrasi dan bisa diakses melalui *online*.

Penjabat Wali Kota Jogja, Sulistiyo mengaku sangat terbantu dengan adanya temuan BPK. Karena dengan demikian, pihaknya dapat mengetahui kelemahan. "Sehingga kita bisa memperbaiki lagi pengelolaan pajak sehingga pendapatan daerah bisa optimal," kata dia.

Sulis juga mendukung dibentuknya Pansus di DPRD Kota Jogja untuk mengawasi tindakan lanjut dari rekomendasi BPK. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005